

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita	: Pengelolaan Dana PIPPK Tidak Transparan
Entitas / Cakupan	: Kota Bandung
Sumber / Hal	: Pikiran Rakyat / Hal.2
Edisi	: Selasa, 23 Oktober 2018

## Pengelolaan Dana PIPPK Tidak Transparan



ODED M Danial.\*

**BANDUNG, (PR).-**

Pemkot Bandung berencana meminta alokasi dana kelurahan yang sempat digulirkan pemerintah pusat. Wali Kota Bandung Oded M Danial berharap, dana kelurahan itu nominalnya sama dengan dana desa yang sudah berjalan.

"Sekarang ada tren dari pusat ada dana kelurahan. Mudah-mudahan itu bagian dari aspirasi yang bisa direalisasikan. Kalau ada, bisa direalisasikan, ya alhamdulillah. Kalau dana desa Rp 1 miliar, harapannya dana kelurahan juga sama," kata Oded, di Balai Kota Bandung, Senin (22/10/2018).

Oded menyambut baik rencana dana kelurahan yang akan digelontorkan pemerintah pusat. Ia mengatakan, dana kelurahan itu bermula dari aspirasi Asosiasi Pemerintah Kota yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo saat pertemuan di Bogor.

Jika terwujud, menurut Oded, dana kelurahan itu akan disandingkan dengan dana PIPPK. Jadi, publik akan menerima manfaat lebih besar jika keduanya digelontorkan. "PIPPK tetap jalan, karena itu kan (dana kelurahan) belum ada. Kalau sudah jalan, baru kita bahas," ucapnya.

Saat ini, untuk peningkatan dana PIPPK masih dalam tahap pembahasan di DPRD Kota Bandung. Oded berharap anggaran bisa cukup sehingga dana yang dipakai untuk pembangunan di tingkat masyarakat bisa meningkat dua kali lipat.

"Kita lihat nanti kesanggupan anggarannya. Kalau bisa, alhamdulillah. Kalau enggak, ya bertahap. Semangat kita ingin maksimal, ideal. Tapi ketika melangkah, bekerja, disesuaikan dengan kondisi anggaran," ujar Oded.

Terkait kasus korupsi PIPPK yang dilakukan lurah di Bandung, Oded akan menjadikan kasus tersebut sebagai bahan koreksi. Untuk masa mendatang, manajemen pengawasan perlu dimaksimalkan. "(pengawasan) terus akan saya lakukan, tingkatkan, terutama pengguna anggaran," ujarnya.

Meski ada rencana penambahan, pengelolaan dana PIPPK masih jauh dari transparan. Hingga saat ini, pemkot belum memiliki standar pengawasan yang baku. PIPPK adalah realisasi janji politik "Rp 100 Juta Per RW" Ridwan Kamil dan Oded M Danial dalam kampanye Pemilihan Wali Kota Bandung pada 2013 lalu. Program itu pertama kali gulirkan pada tahun anggaran 2015. Hingga tahun 2017, sudah hampir Rp 600 miliar digelontorkan untuk PIPPK.

"Untuk program yang menyedot dana demikian besar, PIPPK masih terlalu minim pengawasannya. Pemkot harus segera membuat standar baku pengawasan sehingga potensi pelanggaran tidak membesar," kata peneliti Perkumpulan Inisiatif, Donny Setiawan, Senin (22/10/2018) siang.

Penyelewengan dana PIPPK mencuat pekan lalu setelah seorang lurah di Kota Bandung ditahan. Ia diduga menyalahgunakan dana PIPPK tahun anggaran 2015.

Menurut Donny, lemahnya sisi pengawasan bersumber dari belum transparannya pengelolaan dana itu. Ia mengusulkan pemkot membuat sebuah aplikasi khusus PIPPK. Lewat aplikasi tersebut, warga dapat memantau setiap tahap penyaluran dan pengelolaan dana.

"Kalau sekarang, praktis penyaluran dan pengelolaan dana tidak terpantau. Warga, bahkan ketua RW pun, tidak mengetahui sejauh mana perjalanan dana tersebut. Ini pangkal permasalahan," katanya. **(Muhammad Fikry Mauludy, Tri Joko Her Riadi)\*\*\***